

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/AKIP) Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai implementasi manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan evaluasi internal mengacu pada ketentuan Kementerian PANRB mengenai Evaluasi AKIP serta pedoman evaluasi internal pemerintah daerah. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan penerapan AKIP sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi internal bertujuan untuk:

1. Menilai penerapan AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Mengukur ketercapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.
3. Mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi manajemen kinerja.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan nilai AKIP.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi meliputi:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja Organisasi

BAB II

HASIL EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

A. Gambaran Umum Hasil Evaluasi

Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal hingga pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan melalui reviu dokumen, pengujian data dukung, wawancara dengan pengelola kinerja, serta analisis kesesuaian penerapan AKIP dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan AKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan baik. Dokumen perencanaan kinerja telah tersusun secara berjenjang dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2030, Renja, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Aksi. Proses pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi triwulanan yang didukung dengan data capaian indikator kinerja.

Pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 juga telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memuat analisis pencapaian sasaran strategis, faktor pendukung, faktor penghambat, dan tindak lanjut perbaikan. Selain itu, evaluasi internal telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

erdasarkan hasil evaluasi, implementasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mampu mempertahankan capaian kinerja yang baik dengan terpenuhinya seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

B. Hasil Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diukur melalui empat indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital. Hasil capaian masing-masing indikator menunjukkan bahwa seluruh target tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah berhasil mencapai kategori **A** dengan nilai **86,50**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah diterapkan secara efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja.

Pada indikator **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mencapai nilai **4,25**. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan semakin baiknya tata kelola SPBE, integrasi layanan digital, penguatan tata kelola data, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk indikator **Keterbukaan Informasi Publik**, Dinas Komunikasi dan Informatika kembali mempertahankan predikat **Informatif** dengan nilai **99,95**. Capaian ini menunjukkan konsistensi perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik dari aspek pengumuman informasi, pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi maupun kualitas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sementara itu, **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah** memperoleh nilai **97**. Walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian maksimal pada tahun-tahun sebelumnya, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah berada pada kategori sangat baik serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

C. Analisis Perkembangan Capaian Kinerja

Apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, implementasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren yang positif. Nilai AKIP mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai **86,50** pada Tahun 2025 dengan predikat **A**.

Demikian pula dengan Indeks SPBE yang mengalami peningkatan signifikan dari **3,35 pada Tahun 2021**, menjadi **3,40 pada Tahun 2022**, meningkat menjadi **3,55 pada Tahun 2023**, kemudian melonjak menjadi **4,20 pada Tahun 2024**, dan kembali meningkat menjadi **4,25 pada Tahun 2025**. Tren tersebut mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital, penguatan tata kelola SPBE, interoperabilitas sistem, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Pada aspek Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mampu mempertahankan predikat **Informatif** selama beberapa tahun terakhir dengan peningkatan nilai evaluasi

hingga mencapai **99,95**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan informasi publik terus terjaga dan semakin memenuhi standar pelayanan informasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Sementara itu, nilai kematangan inovasi masih berada pada kategori sangat baik meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi **97** pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk terus meningkatkan kualitas inovasi melalui penguatan aspek keberlanjutan, dampak inovasi, dan replikasi inovasi di masa mendatang.

D. HASIL EVALUASI KINERJA

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja perangkat daerah.	A (86,5)	A (86,5)	100%	Tercapai
2.	Indeks SPBE	Nilai yang menggambarkan tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	4,25	4,25	100%	Tercapai
3.	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan evaluasi Komisi Informasi.	Informatif (99,95)	Informatif (99,95)	100%	Tercapai

4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Penilaian terhadap tingkat kematangan inovasi yang dikembangkan perangkat daerah.	97	97	100%	Tercapai
----	---	---	----	----	------	----------